

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan *leading* sektor bagi pembangunan ekonomi di Bali. Sektor Pariwisata merupakan industri global yang khas dan berbeda dengan banyak industri global konvensional lain. Pariwisata adalah *never ending industry*, atau industri yang tak mengenal akhir. Maka tantangan bagi setiap upaya pengembangan industri pariwisata yaitu penyesuaian yang terus menerus pada iklim ekonomi bisnis baru, perubahan pasar baru, serta perkembangan sosio-ekonomi bahkan sosio-politik baru.

Berbagai program dan kegiatan bertaraf internasional dan nasional di dalam maupun luar negeri terus ditingkatkan. Hal ini untuk mendukung pencapaian kunjungan wisatawan mancanegara (*wisman*) dan wisatawan nusantara (*wisnus*) serta dalam kerangka pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

Lumpuhnya sektor pariwisata pasca peristiwa Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 dan Bom Bali II pada tanggal 1 Oktober 2005 membuat kekhawatiran berlebih akan tingkat keamanan di Bali oleh para wisatawan asing maupun lokal. Bahkan ada kekhawatiran teror itu mengancam masa depan Pulau Bali sebagai tujuan wisata dunia.

Tragedi bom Bali, memiliki dampak yang luar biasa. Tidak hanya bagi Bali, melainkan juga Indonesia secara keseluruhan. Nama Indonesia tercoreng

karena peristiwa Bom Bali I 12 Oktober 2002 yang kemudian disusul pula peristiwa Bom Bali II 1 Oktober 2005, yang mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan sarang teroris yang sangat tidak aman untuk dikunjungi ataupun untuk aktifitas lainnya seperti bisnis, pendidikan dan beberapa infrastruktur lainnya. Tragedi Bom Bali 1 dan 2 benar-benar melumpuhkan sektor pariwisata yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah terbesar untuk propinsi Denpasar-Bali.

Krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia khususnya Indonesia pada tahun 1997, secara tidak langsung memberikan beban-beban dan kewajiban yang masih harus ditanggung oleh negara sampai sekarang sebagai beban krisis. Seperti yang diungkapkan oleh pengamat komunikasi politik internasional dari Universitas Hasanuddin Makassar, Mansyur Semma bahwa:

“Secara ekonomi jelas akan sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia khususnya di sektor pariwisata, secara ideologi Indonesia akan dituduh sebagai negara teroris, sedangkan secara budaya akan melahirkan stigma buruk bagi masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang tidak beradab.”¹

Pernyataan diatas sekaligus menjadi bukti bahwa keterkaitan adanya aksi terorisme dengan perekonomian. Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya aksi-aksi terorisme di Indonesia, terjadi akibat tidak terakomodasi kepentingan-kepentingan dari sebagian elemen-elemen masyarakat oleh pemerintah negara ataupun tata percaturan politik internasional. Pada akhirnya hal inilah yang menimbulkan keterpurukan sendi-sendi sosial-perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia.

¹ “Berita>>Politik Nasional”, <http://www.kapanlagi.com/h/0000085902.html>. diakses pada 27

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah mengakibatkan beban Indonesia di berbagai bidang menjadi semakin berat. Beban tersebut antara lain perekonomian karena besarnya jumlah pinjaman luar negeri yang harus dikembalikan akibat penyesuaian terhadap nilai tukar US Dollar, dari sisi sosial kehidupan masyarakat Indonesia sebagai aktor penting penyelenggara sistem pariwisata di Indonesia juga mengalami keterpurukan yang luar biasa akibat inflasi,² yang berakibat pada turunnya tingkat daya beli masyarakat Indonesia, sedangkan dari sisi politik, krisis moneter telah mengakibatkan turunnya kredibilitas dan kapabilitas rezim yang membangun sebuah kondisi instabilitas pada sistem politik dan pemerintahan Indonesia.

Berbagai kasus kontraproduktif diatas mengakibatkan sebuah momentum penurunan kunjungan jumlah wisatawan manca negara dan domestik lintas pulau di Indonesia. Diprediksikan pasca kasus resesi global (krisis moneter) tahun 1997-1998 jumlah kunjungan wisata ke Indonesia mengalami penurunan sebesar lebih dari 42 persen, atau setara dengan lebih dari 3,8 juta wisatawan perbulan.³ Kasus menurunnya kunjungan wisatawan ke Indonesia menunjukkan perbaikan pada akhir tahun 2000, namun hal ini tidak bertahan lama karena keamanan dunia semakin rawan setelah kasus tragedi peledakan gedung pusat perdagangan dunia WTC (*World Trade Centre*) di New York pada 11 September 2001, yang kemudian dilanjutkan dengan aksi terorisme lainnya, yaitu kasus Bom Bali I

² Inflasi berasal dari bahasa latin *inflatio* yang berarti bertambahnya jumlah uang secara terus-menerus, sehingga menyebabkan nilainya merosot., *Microsoft Encarta Dictionary*, Free Ensiklopedia CD ROM, 2005.

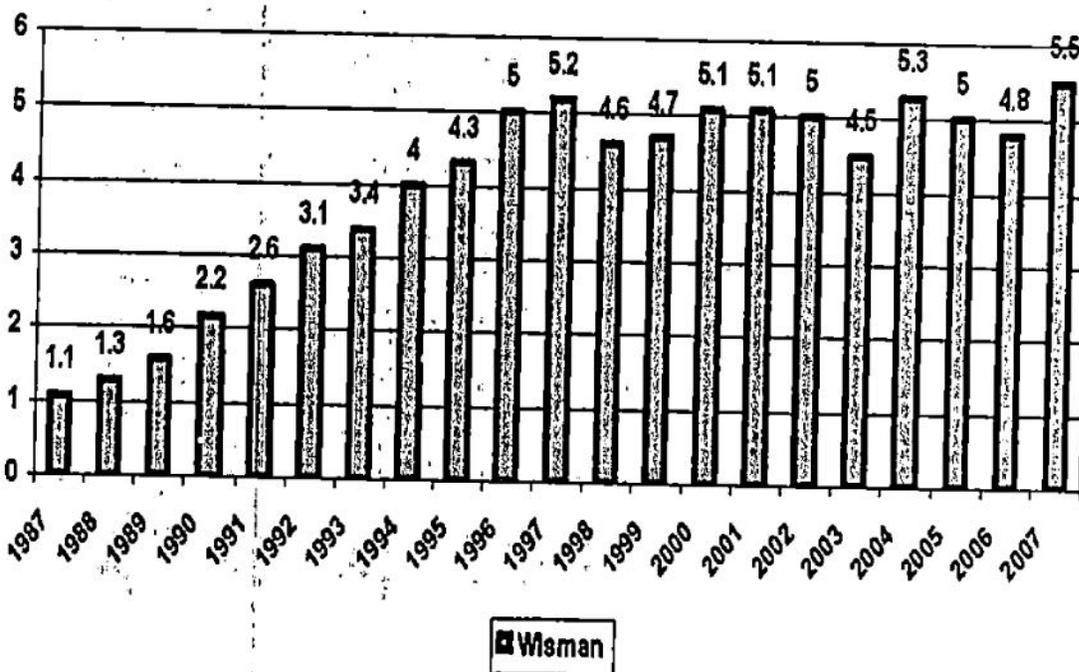
³ "Krisis Moneter Akibatkan Penurunan Kunjungan Wisata", *Media Indonesia*, 21 Agustus 2003.

dan II, serta kasus-kasus teror peledakan bom di Indonesia lainnya yang secara otentik berhasil menurunkan tingkat kunjungan wisata ke Indonesia.⁴

Gambaran tentang penurun jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik pasca terjadinya resesi global (krisis moneter) dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Skema 1.1.

Gambaran Penurunan Tingkat Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik Pasca Krisis Moneter Tahun 1997



Sumber : "Visit Indonesia Year : Tantangan dan Peluang", <http://www.setneg.go.id>, diakses pada tanggal 27 Maret 2008.

Indonesia dengan bantuan IMF dan juga akibat penjaminan dan *Bail Out* perbankan yang lebih besar mengalami pemulihan yang lebih lambat dari krisis

ekonomi yang tengah dihadapi ketimbang negara-negara Asia tenggara lainnya.⁵ Fakta inilah yang menjadi gambaran otentik bahwa sebenarnya keberadaan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya sebagai negara dunia ketiga, cenderung memiliki sumber daya industri yang terbatas sebagai penopang kredibilitas, eksistensi dan kontinuitas pembangunan.⁶ Terkait hal tersebut sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, dan pada akhirnya mampu memberikan kontribusi meningkatkan pendapatan daerah melalui pengembangan dan pendayagunaan potensi kepariwisataan daerah.⁷

Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, Jero Wacik pada Selasa, 19 Juni 2007 dalam paparannya mengenai Strategi dan kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata salah satunya adalah dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui peningkatan daya saing pariwisata guna meningkatkan penerimaan pemasukan devisa negara.

Dalam rangka menyambut 100 tahun kebangkitan bangsa Indonesia yang jatuh pada tahun 2008, pemerintah bersama dunia swasta dan para *stakeholder* bidang kebudayaan dan pariwisata (Budpar) akan menggelar sejumlah even

⁵ Dikutip dari Orasi Ilmiah Wapres RI, Jusuf Kalla, pada Acara Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Ekonomi dari Universiti Malaya, di Kuala Lumpur, tanggal 21 Juli 2007.

⁶ Negara dunia ketiga adalah istilah yang mengemuka pada era perang dingin untuk mewakili kelompok negara miskin-berkembang, sedangkan rivalnya adalah negara industri maju, *Microsoft Encarta Dictionary*, Free Ensiklopedia CD ROM, 2005.

⁷ Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Prov.Kalteng, *Memori Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Prov.Kalteng 2006-2007*.

budaya antara lain *World Cultural Forum* di Bali. Selain sebagai forum pertemuan kepala negara, dalam even ini juga akan digelar seminar internasional dengan topik Kebudayaan dan perdamaian. Dalam *World Cultural Forum* itu juga akan ditampilkan karya puncak kesenian dan kebudayaan dari berbagai negara belahan dunia.⁸

Untuk mendukung acara tersebut pemerintah Indonesia memacu penyelesaian pembangunan Garuda Wisnu Kencana (GWK) yang merupakan salah satu ikon pariwisata Bali selain Pantai Kuta. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, Jero Wacik berharap *World Cultural Forum* harus dijalankan dan apabila memungkinkan bisa mengejar selesainya pembangunan GWK. "Kalau belum selesai 100 persen, ada satu atau dua *venue* yang bisa dilaksanakan di GWK, sisanya di tempat lain," ujar Jero Wacik menuturkan arahan presiden.⁹ Keberadaan GWK mempunyai arti penting bagi agenda *World Cultural Forum* karena di kompleks inilah event akan digelar, sekaligus akan menjadi maskot dalam even kebudayaan internasional ini.

Pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan yang dilaksanakan secara terus-menerus diharapkan akan dapat menghasilkan kegiatan budaya berpikir positif, kemudian akan dilanjutkan dengan budaya berbicara positif. Berpikir positif dan berbicara positif ini akan menjadi modal dasar untuk menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat serta pemahaman terhadap multikulturisme yang akan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁸"Berita", http://www.ri.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=3980&Itemid=707, diakses pada 2 April 2007

⁹"Berita", http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=4341&Itemid=701, diakses pada 2 April 2007.

(NKRI), dengan demikian semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif, sehingga dalam hal ini keberadaan Pemerintah Indonesia sebagai "stakeholder" dituntut untuk berperan aktif dalam pengembangan sektor kebudayaan, melalui kegiatan dan event-event kebudayaan, mengingat besarnya pengaruh (*multiplier effect*) sektor ini terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Kegiatan kebudayaan bertaraf nasional dalam kerangka pelestarian dan pengembangan budaya daerah telah dilakukan dengan mencanangkan tahun 2005 sebagai "Tahun Festival Seni Budaya Indonesia" oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian pada tahun berikutnya serentetan penyelenggaraan untuk dukungan festival budaya di daerah telah digelar. Selama tahun 2006 tidak kurang 100 kegiatan festival budaya digelar di berbagai daerah, dan kegiatan itu mendapat sambutan positif dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan generasi muda dan yang paling penting akan mendapatkan respon positif dari wisatawan mancanegara.

Di tahun 2008 ini, pemerintah Indonesia menggunakan bidang kebudayaan sebagai alat perjuangan untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dalam pergaulan antar bangsa yang sesungguhnya lewat forum bertaraf Internasional. Forum inilah yang diharapkan dapat memberi kemajuan dalam bidang pariwisata Bali dan daerah lain di Indonesia, pasca kasus-kasus kontraproduktif yang mengemuka pada pasca krisis moneter.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan satu pokok permasalahan yaitu :

“Bagaimana peran WCF (*World Cultural Forum*) Bali 2008 dalam memperbaiki sektor pariwisata Indonesia yang terpuruk ?

C. Kerangka Dasar Teori

Untuk menjelaskan masalah yang ada, maka penulis akan menggunakan konsep kepentingan nasional dan konsep diplomasi kebudayaan. Konsep-konsep ini diharapkan dapat digunakan sebagai kerangka dasar pemikiran untuk menjelaskan permasalahan yang ada.

1. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional sangat penting bagi setiap usaha untuk menerangkan, menjelaskan, meramalkan atau membuat preskripsi mengenai perilaku internasional. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional adalah :

“Tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.”¹⁰

¹⁰ Jack C. Plano, Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, terjemahan Wawan Juanda, Third edition, Clio Press Ltd, England. 1982. hal 7.

Sedangkan menurut Morgenthau, kepentingan nasional suatu negara adalah : *"Sebuah formula untuk mengejar kekuasaan yaitu apa saja yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain."*¹¹ Kekuasaan tidak akan tercapai tanpa adanya kekuatan nasional. Politik suatu negara tidak bisa lepas dari suatu kepentingan nasional, karena tujuan politik adalah untuk mempertahankan kepentingan nasional.

Dari konsep kepentingan nasional yang telah disebutkan diatas, maka pada dasarnya kepentingan suatu bangsa-bangsa dalam percaturan masyarakat internasional tidak terlepas dari dua hal yang menjadi tujuan utama negara tersebut, yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi dan prestise. Kemampuan sebuah bangsa untuk dapat bangkit dan mencapai tingkat kemakmuran ditentukan oleh kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. Upaya untuk pencapaian kemakmuran harus didorong dan dirangsang oleh negara dengan menjamin tersedianya sumber daya manusia terdidik dan infrastruktur fisik yang efisien.

World Cultural Forum 2008 yang akan dilaksanakan di Bali diyakini memiliki dampak yang sangat besar terhadap Indonesia secara keseluruhan. Selain sebagai sarana promosi budaya, perhelatan akbar ini tidak hanya sebagai wujud nyata dari bangkitnya dunia pariwisata Indonesia khususnya Bali pasca peristiwa Bom Bali 1 dan Bom Bali 2, akan tetapi sudah menjadi *event* global yang diikuti dan dinikmati oleh masyarakat seluruh dunia. Sehingga efek dari *event* ini akan berdampak positif bagi negara penyelenggara.

¹¹ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta I.P3ES

Seperti halnya konferensi-konferensi tingkat dunia yang mengeluarkan dana tidak sedikit, hal ini setidaknya dapat menguntungkan Indonesia demi mencapai kepentingan nasionalnya, antara lain yaitu :

a. Kesejahteraan Ekonomi

Setiap pemerintahan di dunia pada umumnya mempunyai tujuan untuk memajukan dan mengembangkan kepentingan ekonomi negaranya. Tujuan yang meliputi upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, baik secara keseluruhan maupun individu dan dapat dicapai melalui jangka pendek maupun jangka panjang.

Kesejahteraan perekonomian merupakan tujuan dari sebuah negara yang absolut. Sehingga hal ini yang mendorong sebuah negara untuk membina hubungan baik terhadap elemen-elemen dari luar negeri, hal inilah yang juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan diplomasi kebudayaan. Kenyataan ini diperkuat dengan pernyataan Aristoteles terkait dengan keamanan nasional yaitu, *"The State come into existence originating in the bare needs of life and continuing in for the sake of good life"*.¹² (Negara mendapatkan eksistensinya berdasarkan kebutuhan hidup yang mendesak dan kemudian tetap diperlukan keberadaanya untuk membina kehidupan yang lebih baik). Hampir pada setiap negara di dunia

¹² Aristoteles terjemahan Benvamin Jowett dalam F. Iswara *Pencantar Ilmu Politik* Rajawali

memiliki tujuan utama yang homogen yang dapat diklasifikasikan menjadi dua hal pokok yaitu :¹³

- a. Keamanan dan keselamatan (*security and safety*).
- b. Kesejahteraan dan kemakmuran (*welfare and prosperity*).

Bagi Indonesia sendiri, *World Cultural Forum* Bali 2008 merupakan suatu kesempatan meningkatkan pendapatan bagi negara. Seminar internasional dengan pembahasan kebudayaan dan perdamaian ini dapat membuka jalan untuk mengembalikan kepercayaan dunia internasional bahwa Indonesia negara yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Bukan tidak mungkin *event* ini juga menarik wisatawan asing untuk kembali mengunjungi Bali, sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian yang didapatkan melalui keberhasilan pada sektor pariwisata.

- b. Status (*Prestige*)

Untuk mencapai tujuan nasional, pemerintah juga berusaha meningkatkan prestise negaranya. Pandangan tradisional menyatakan bahwa sumber utama status adalah dalam hal unjuk kekuatan militer dan kekuasaan. Akan tetapi seiring dengan perkembangan jaman, maka keunggulan di berbagai bidang kehidupan juga memegang peranan penting dalam peningkatan prestise suatu bangsa. Seperti tingkat perekonomian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan pelaksanaan konferensi internasional.

¹³ T. May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik : Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Refika Aditama Press, Bandung, 2003, hal.64-65.

Berdasarkan pada kedua pendekatan diatas maka dapat diketahui bahwa agenda forum budaya dunia adalah bagian dari kebijakan internasional, yang sangat tergantung pada orientasi karakter pemimpin dalam hal ini Pemerintah Indonesia. Menurut Richard Snyder dan Burton Sapin, proses pembuatan kebijakan berkaitan erat kapabilias pemimpinnya, sehingga sebenarnya kebijakan negara adalah kebijakan pemimpinnya serta baik atau buruk kebijakan bergantung pada kredibilitas pemimpin dari rezim itu sendiri hal ini dapat dilihat melalui pernyataannya :

Merupakan salah satu dari pilihan-pilihan metodologis pokok kita untuk menerapkan batasan negara pada para pembuat keputusan, yaitu mereka yang tindakan otoritarifnya baik maksud ataupun tujuannya adalah tindakan negara. Tindakan negara adalah tindakan yang diambil oleh mereka yang melakukan atas nama negara.¹⁴

Prestise sendiri merupakan upaya yang dijalankan oleh suatu negara untuk memperoleh image (citra) positif dari negara-negara luar, sehingga hal ini akan membangun sebuah kondisi yang lebih menonjol daripada negara-negara lain. Kenyataan ini pada akhirnya membangun sebuah aspek ketertarikan bagi pihak-pihak luar yang kemudian merespon positif dan kemudian akan memberikan sebuah keuntungan (profit) bagi negara yang menjalankan kebijakan tersebut.

Dengan adanya *World Cultural Forum* ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan devisa negara, meningkatkan gengsi, sekaligus untuk unjuk gigi ; memperlihatkan kemampuan untuk mengoptimalkan kekuatan nasional melalui pelaksanaan pertemuan internasional yang membahas tentang

¹⁴ Richard Snyder and Burton Sapin, *Decisions Making as an Aproach to Study of International Polttics* dalam Amien Rais. *Teori-Teori Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah*

kebudayaan dan membawa misi perdamaian. Pertemuan ini secara otomatis akan mendapat perhatian dunia pers, termasuk pers internasional. Sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk menaikkan prestise terhadap proses penyelenggaraan forum yang dihadiri kepala negara seluruh dunia.

Mekanisme pembiayaan untuk melanjutkan pembangunan Megaprojek GWK diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 672,9 miliar, masing-masing untuk pembangunan patung senilai Rp 190 miliar, bangunan setara hotel 50 tingkat Rp 67 miliar. Sisanya digunakan untuk pembebasan sebagian lahan, serta membangun *exhibition center*, areal parkir, Tirta Agung, Lotus Pond, Pedestal, Gapura 1.000 *Theatre*, *Bali Living People Diorama*, Giri Kencana Villa, dan *Trade and Promotion Center*.¹⁵ Berbagai kebijakan pembangunan tersebut diatas, nantinya diharapkan akan dapat mendukung kepentingan nasional Indonesia yang diperoleh melalui sektor pariwisata, yang sebelumnya terpuruk oleh berbagai kasus antara lain maraknya aksi terorisme, resesi global hingga kondisi instabilitas sosial-politik.

Melalui agenda *World Cultural Forum 2008* di Bali, maka diharapkan akan menjadi sebuah terobosan yang efektif yang berperan sebagai faktor pemicu, sekaligus sebagai tonggak sejarah (*milestone*) yang diupayakan sebagai pembuka “babak baru” dalam kebangkitan sektor pariwisata di Indonesia. Sektor pariwisata merupakan sektor yang khas yang sangat rentang terhadap berbagai situasi dan kondisi yang mengemuka. Beberapa kasus yang terjadi dalam rentang tahun 2001-2008, antara lain merebaknya kasus terorisme, antara lain kasus bom Bali I dan II,

¹⁵ “Pariwisata dan Kebudayaan, kekayaan Yang Tak Pernah Berakhir”, http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id_diakses_pada=23_Agustus_2008

peledakan bom di JW Mariot Hotel dan beberapa kasus terorisme lainnya. Disamping itu, bencana alam antara lain gempa bumi dan banjir, serta merebaknya isu wabah penyakit HIV/AIDS dan flu burung (*avian disease*) telah secara otentik menimbulkan depresiasi yang luar biasa bagi sektor pariwisata Indonesia, yang berperan sebagai salah satu pilar penopang perekonomian Indonesia.

Depresiasi perekonomian Indonesia berawal dari pertengahan dekade tahun 1990, tepatnya pada tahun 1997 akibat resesi global (krisis moneter). Kondisi instabilitas perekonomian ini berakibat pada membengkaknya beban hutang luar negeri. Pada sektor sosial-ekonomi akibat resesi global berakibat pada meningkatnya tingkat pengangguran, tingginya inflasi dan meningkatnya beban hidup masyarakat dan negara.

Kondisi instabilitas perekonomian Indonesia pasca krisis moneter, mendorong Pemerintah Indonesia untuk kembali mendorong sektor pariwisata sebagai salah satu pilar perekonomian andalan Indonesia. Bagi negara manapun perekonomian merupakan sesuatu hal absolut yang harus terus diperjuangkan karena telah menjadi bagian integral dari kepentingan nasional (*national interest*).

Momentum *World Cultural Forum* tahun 2008 di Bali menjadi sebuah even penting dalam memajukan berbagai keterpurukan pada sektor pariwisata. Melalui pembangunan GWK dan infrastruktur lainnya akan menjadi sebuah tolak ukur, sekaligus standar motivator bagi promosi-promosi pariwisata Indonesia di negara-negara manca sebagai bukti nyata tentang kemajuan pariwisata Indonesia

yang menyatakan diplomasi dalam hubungannya dengan politik internasional adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.¹⁷ Sedang kebudayaan secara makro dapat diartikan sebagai: keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.¹⁸

Dengan demikian Diplomasi Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai berikut :

“Usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian, ataupun secara makro sesuai dengan ciri-ciri khas yang utama, misalnya propaganda dan lain-lain, yang dalam pengertian konvensional dapat di anggap sebagai bukan politik, ekonomi, ataupun militer.”¹⁹

Tujuan utama dari diplomasi kebudayaan adalah untuk mempengaruhi pendapat masyarakat umum ataupun negara lain, seperti kebijakan (*policy*) pemerintah dari masyarakat yang bersangkutan. Sarana yang digunakan adalah segala macam alat komunikasi baik media elektronik ataupun media cetak. Materi maupun mikro dianggap sebagai pendayagunaan aspek budaya (dalam politik luar negeri) antara lain kesenian, pariwisata, olahraga, tradisi, teknologi, hingga pertukaran ahli dan sebagainya.

Dengan demikian maka ketentuan diatas sangat relevan dengan kasus motivasi pemerintah Indonesia dalam agenda penyelenggaraan *World Cultural Forum* di Bali tahun 2008. Keterpurukan kondisi pariwisata Indonesia sejak kasus

¹⁷ SL Roy, *Diplomacy*, terjemahan Harwanto & Mirsawati, Rajawali Press, Jakarta, 1991, hal.3.

¹⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi Budaya*, Aksara Baru Jakarta, 1979, hal. 139.

¹⁹ Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi kebudayaan, Konsep Dan Relevansi Bagi Negara Berkembang : Studi Kasus Indonesia*, Ombak, Yogyakarta 2007, hal 4

krisis moneter hingga maraknya aksi terorisme dan bencana alam membuat goncangan yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia, sedangkan di lain pihak sebagai negara dunia ketiga, Indonesia sangat tergantung dengan sektor pariwisata salah satu pilar penopang perekonomian negara.

Dalam upaya membangkitkan sektor pariwisata Indonesia yang terpuruk, tentunya memerlukan sebuah upaya dan kebijakan yang komprehensif, antara lain komunikasi yang baik, dan disinilah *World Cultral Forum Bali tahun 2008*, dimaksudkan sebagai media rekonsiliasi bagi pemulihan sektor pariwisata Indonesia yang terpuruk. *Agenda World Cultural Forum* di Bali tahun 2008 ini menjadi sebuah rencana penting karena di dalamnya mengandung aspek promosi, diplomasi kebudayaan, sekaligus peningkatan prestise bagi sektor pariwisata Indonesia yang terpuruk.

Kebudayaan mempunyai unsur-unsur universal yang mana unsur-unsur tersebut terdapat pada semua kebudayaan bangsa-bangsa di dunia pada dasarnya kebudayaan bersifat komunikatif dan dapat dipahami oleh masyarakat yang mempunyai latar belakang berbeda sekalipun. Kebudayaan juga bersifat manusiawi sehingga dapat lebih mendekatkan antar bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Jadi diplomasi kebudayaan merupakan media diplomasi yang efektif, yang dapat di jadikan sarana interaksi budaya dan komunikasi untuk memahami kebudayaan masing-masing negara.

Pertukaran kebudayaan memungkinkan rakyat masing-masing untuk mengetahui pandangan satu sama lain dengan cara yang baik, tujuan diplomatik dengan mengirimkan delegasi kebudayaan adalah untuk memamerkan keagungan

kebudayaan suatu negara dan apabila mungkin untuk mempengaruhi pendapat umum negara yang di datangi.

Menurut *Microsoft Encarta Dictionary*, kebudayaan adalah merupakan bentuk jamak dari akal manusia sebagai upaya untuk mengolah atau mengerjakan sesuatu agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupannya.²⁰ Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah *Cultural-Determinism*. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai *superorganic*. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, dan ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.²¹

Berdasar pada dua definisi kebudayaan tersebut diatas, memang terdapat konteks yang berbeda-beda berdasar pada struktur pernyataan, namun sebenarnya esensi diantara keduanya adalah memiliki kesamaan. Hal ini dapat dilihat bahwa kedua definisi tersebut menekankan pada perjuangan kebudayaan suatu negara untuk memperoleh sebuah eksistensi dan pengakuan dari elemen, organisasi, regional ataupun secara internasional, sehingga dengan hal ini suatu dapat memperoleh kepentingan dari negara lain.

²⁰ "Culture : Definition" *Microsoft Encarta Dictionary*. Free Enciklopedia CD Rom, 2005

Adapun hal-hal yang dianggap relevan dalam mengidentifikasi fenomena-fenomena Diplomasi Kebudayaan dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Kajian terhadap setiap usaha diplomasi yang menggunakan media kebudayaan dalam arti mikro seperti eksebisi, pertukaran misi pendidikan, kompetisi, olahraga dan lain-lain. Walaupun bersikap mikro arti kebudayaan tersebut justru merupakan pengertian yang konvensional.
- b. Kajian terhadap usaha diplomasi yang menggunakan media kebudayaan dalam arti makro seperti propaganda, hegemoni, dan lain sebagainya.

Melalui pendekatan konsep diplomasi kebudayaan diatas maka dapat diaplikasikan pada kasus motivasi Indonesia sebagai penyelenggara *World Cultural Forum* 2008 di Bali bahwa sebenarnya dalam interval tahun 2001-2008, merujuk pada jangkauan karya skripsi ini, Indonesia menghadapi berbagai problematika sosial, ekonomi, politik dan stabilitas pertahanan-keamanan. Kasus belum normalnya perekonomian Indonesia akibat resesi global pada tahun 1997-1998, instabilitas bidang politik pasca reformasi yang ditandai dengan intensitas pergantian pemimpin dari Baharudin Jusuf Habibie hingga Soesilo Bambang Yudhoyono, hingga kasus peledakan Bom Bali I dan II membuat degradasi Indonesia di berbagai bidang-bidang tersebut.

Kondisi Indonesia tahun 2001-2008 yang belum stabil, membuat Pemerintah Indonesia menjalankan langkah-langkah strategis untuk mengembalikan stabilitas Indonesia di berbagai bidang khususnya sosial-

ekonomi dan politik. Namun keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki sumber daya perekonomian yang minim membuat berbagai kendala yang kemudian mengemuka. Keberadaan sektor pariwisata Indonesia merupakan sumber daya andalan menjadi salah satu opsi dalam pemulihan perekonomian Indonesia.

Melalui uraian pendekatan diplomasi kebudayaan diatas maka diaplikasikan bahwa dalam mekanismenya diplomasi kebudayaan, memiliki karakter yang berbeda dengan diplomasi politik, diplomasi tawar menawar (*bargain diplomacy*) ataupun diplomasi ekonomi-perdagangan. Hal ini dikarenakan diplomasi kebudayaan sangat terkait dengan sebuah momentum. *Agenda World Cultural Forum 2008* bagi Pemerintah Indonesia dianggap sebagai agenda strategis untuk mempromosikan berbagai sumber daya pariwisata Indonesia, yang nantinya diharapkan dapat mendukung eksistensi pariwisata Indonesia.

Keberadaan Indonesia dalam rentang tahun 2001-2008 merujuk pada jangkauan penelitian karya skripsi ini, Indonesia masih menghadapi berbagai problematika sosial-perekonomian yang memiliki keterkaitan dengan aspek politik dan pemerintahan. Resesi global atau yang lebih dikenal dengan krisis moneter yang melanda Indonesia pada kisaran tahun 1997-1998 yang berdampak pada depresiasi perekonomian Indonesia yang mengakibatkan membengkaknya beban hutang luar negeri Indonesia.

Pada kenyataannya, ineskipun Indonesia tergolong negara dunia ketiga yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun orientasi yang salah

akibat maraknya penyalahgunaan kekuasaan, terkait dengan masalah kolusi, korupsi dan nepotisme membuat kondisi perekonomian Indonesia belum menunjukkan perbaikan secara signifikan. Fakta inilah yang kemudian mendorong rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempersepsikan sektor pariwisata sebagai sektor yang menjanjikan pemasukan bagi perekonomian Indonesia yang sedang mengalami kegoncangan.

Berdasarkan pada pernyataan pendekatan diatas maka dapat dipersepsikan bahwa kebudayaan merupakan buah dari peradaban manusia (*human civilization*) yang sebenarnya dapat diterima oleh berbagai kalangan dunia. Namun ternyata seiring dengan perkembangan globalisasi eksistensi dan kredibilitas kebudayaan dan pariwisata tidak dapat berdiri sendiri, namun perlu intervensi pemerintah. Hal inilah yang mendorong terciptanya relevansi diplomasi kebudayaan dan pariwisata untuk mendorong terealisasinya kepentingan nasional Indonesia.

D. Hipotesa

Berdasar pada uraian kerangka dasar teori diatas maka dapat ditarik hipotesa bahwa peran WCF (*World Cultural Forum*) Bali 2008 dalam upaya pemulihan sektor pariwisata Indonesia yang terpuruk adalah melalui kesempatan strategis dalam mempromosikan berbagai sumber daya pariwisata Indonesia, khususnya Bali di negara-negara regional dan internasional karena keberadaan WFC Bali 2008 sebagai media promosi, sekaligus peningkatan prestise dalam upaya memulihkan sektor pariwisata Indonesia yang terpuruk pada periode tahun

E. Tujuan Penelitian

- a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjawab perumusan masalah serta membuktikan hipotesa, tentang motivasi Indonesia sebagai penyelenggara *World Cultural Forum* 2008 di Bali.
- b. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Spesialisasi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam rangka mempermudah penulisan karya skripsi ini penulis memberikan batasan penelitian pada tahun 2001 dan 2008. Dipilih rentang tahun ini karena pada tahun 2001 hingga tahun 2008 adalah karena pada tahun ini mampu merepresentasikan berbagai permasalahan yang terjadi terkait dengan berbagai problematika pariwisata di Indonesia, serta menyangkut aspek jangkauan perolehan data yang diperoleh oleh penulis.

G. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah menggunakan pengumpulan data sekunder, yaitu penulis tidak menjalankan observasi langsung di lapangan, namun berdasarkan pada data yang telah tersedia dengan melakukan

telaah pustaka pada sejumlah literatur, yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti yaitu antara lain :²²

- a. Buku-buku
- b. Jurnal dan dokumen
- c. Majalah dan surat kabar
- d. Artikel-artikel dan data dari internet (*website*)

Teknik analisis data yang penulis pergunakan adalah analisis kualitatif, yang dimaksud adalah penulis akan mengklarifikasi fenomena yang terjadi dari berbagai variabel yang diperoleh. Data yang telah diperoleh tersebut akan diolah, sehingga dapat menggambarkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan disusun dalam suatu tulisan.¹⁴

Teknik lainnya yang akan digunakan penulis dalam karya penelitian ini adalah melalui interview atau wawancara terhadap koresponden yang relevan dan memiliki kompetensi dalam masalah ini. Proses wawancara akan dijalankan secara mendalam dengan para ahli (*stakeholder*) dan pejabat terkait pada Departemen Pariwisata dan Budaya Republik Indonesia di Jakarta. Informasi-informasi yang akurat melalui wawancara tersebut dikumpulkan melalui pernyataan-pernyataannya, serta tulisan dan catatan sebagai figur yang merepresentasikan institusi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia, terkait dengan program *World Cultural Forum* Bali 2008.

²² Catherine Cassel and Gillian Symon (editor), *Qualitative Methods in Organizational Research*, Sage Publications, London, 1994, hal.3-4.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984, hal. 57.

H. Kerangka Penulisan

Penulisan karya skripsi ini terbagi atas lima bab pembahasan yaitu sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian dan kerangka penulisan.

Bab Kedua, menjelaskan gambaran umum sektor pariwisata di Indonesia sebagai salah satu sektor yang memajukan sektor perekonomian dan dinamika perkembangannya dari tahun 2001 hingga 2008, mencakup gambaran sarana pendukung dan infrastrukturnya, sekaligus berbagai momentum yang membuat kondisi instabilitas sektor pariwisata Indonesia dari tahun 2001-2008, antara lain maraknya aksi terorisme, wabah flu burung (*avian disease*) hingga tragedi gempa tsunami di Aceh dan sekitarnya, serta peristiwa gempa di Yogyakarta.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang momentum *World Cultural Forum* 2008 di Bali sebagai ajang promosi pariwisata dunia, sejarah diselenggarakannya dan *World Cultural Forum* sebagai arena diplomasi, sekaligus latar belakang dan atmosfer politik yang mempengaruhi event ini.

Bab Keempat, merupakan bab yang berisi tentang pembuktian hipotesa yang membahas tentang manfaat *World Cultural Forum* Bali 2008 bagi kemajuan pariwisata Indonesia, efek positif bagi Indonesia sebagai penyelenggara, meraih kepentingan nasional melalui sektor pariwisata yang terpuruk pada tahun 2001-2008.

Bab Kelima, kesimpulan dari seluruh hasil penulisan skripsi ini.